

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

(Syafie, 2005) Demokrasi saat ini menjadi hal yang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Demokrasi merupakan keadaan Negara dimana sistem pemerintahannya, kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, membangkitkan tuntutan yang lebih luas atas peningkatan kehidupan politik bagi setiap warga Negeranya. Tuntutan – tuntutan itu menginginkan adanya sebuah perubahan demi terwujudnya Negara demokrasi seperti yang diinginkan. Memasuki era Reformasi, sebagai pengganti era orde baru. Era Reformasi ini dimaknai sebagai proses perubahan nilai – nilai lama dan munculnya nilai – nilai baru. Seperti, menguatnya aspirasi demokratisasi, keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan tanggung jawab, sebagai dari nilai – nilai baru.

Berkembang nya nilai – nilai demokrasi ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Partai Demokrat, sebab merupakan fakta bahwa Demokrat dalam perjalananya merupakan bagian penting dari pemerintahan di Indonesia. Pada pemilu legislatif tahun 2004 sebagai partai baru, Demokrat mampu memperoleh suara (7.45%) dibandingkan dengan

partai yang lebih dulu ada yakni Partai Keadilan Sejahtera (7.34%) dan Partai Amanat Nasional (6.44%).

Pada tahun 2009 merupakan tahun bagi Partai Demokrat karena mampu meraup suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif, partai demokrat meraih suara yakni 21.703.137 atau (20,85%). Dengan demikian demokrat mampu mengusung capres/cawapres sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain. Pada tahun yang sama Capres dan Cawapres yang diusung Demokrat terpilih kembali menduduki kursi Kepresidenan untuk periode 2009 – 2014, dengan suara terbanyak, yakni 73.874.562 (60,80%) dibandingkan dengan dua pasangan Capres/Cawapres lainnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU dan KPUD maka perolehan suara sah yang masuk adalah 121.504.481 suara. Pasangan SBY/Budiono memperoleh kemenangan dilebih dari 20% jumlah seluruh Provinsi di Indonesia. Data perolehan hasil rekapitulasi perhitungan suara masing – masing Calon adalah : Capres/Cawapres Megawati-Prabowo 32.548.105 suara sah secara nasional atau (26,79%) pasangan Capres/Cawapres SBY-Budiono 73.874.562% suara sah nasional atau (60,80%), Pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto 15.081.814 suara atau (12,41%). Artinya SBY-Budiono menang mutlak dalam satu putaran saja.

Kemudian Pada tahun 2014 itu pula nampaknya menjadi arena politik yang kurang menguntungkan bagi Partai Demokrat adanya beberapa kasus korupsi yang menimpa kader demokrat membuat penurunan kepercayaan

masyarakat kepada partai tersebut. Partai Demokrat harus puas dengan menduduki posisi ke 4 (Empat) dengan presentase perolehan suara pada pemilu 2014 : PDI-Perjuangan 23.681.471 (18,95%), Partai Golkar 18.432.312 (14,75%), Partai Gerindra 14.760.371 (11,81%) dan Partai Demokrat 12.728.913 (10.19%)¹

Bisa kita lihat degradasi persentase perolehan suara partai Demokrat pada pemilu 2014, mulai menurun dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu sebelum – sebelumnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kader demokrat yang tersandung kasus korupsi, berikut nama – nama kader demokrat tersandung kasus korupsi :

Table 1.1
Berikut ini beberapa kader Partai Demokrat terkena kasus
Korupsi

| No | Nama | Jabatan | Kasus |
|----|---------------------|--|--|
| 1. | Angelina Sondakh | Mantan Wakil Sekjen Demokrat | Korupsi Wisma Atlet |
| 2. | Anas Urbaningrum | Mantan Ketua Umum Partai Demokrat | Proyek Hambalang |
| 3. | Hartati Murdaya | Mantan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat | Korupsi Buol |
| 4. | Jero Wacik | Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat | Korupsi Dana Operasional Menteri |
| 5. | Sutan Bhatoegana | Ketua DPP Partai Demokrat | Korupsi ESDM |
| 6. | Muhammad Nazaruddin | Mantan Bendahara Umum | Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet |

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/784106/daftar-kader-partai-demokrat-yang-terlibat-korupsi>

Dari data diatas institusionalisasi partai politik tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan - kelemahan internal dan eksternal partai. Pelembagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasan merupakan proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya.

Kemudian fenomena menurunnya persentase suara partai pada pemilu diatas, cukup membuktikan bahwa lemahnya kaderisasi yang dilakukan partai politik, sehingga tidak mampu membentengi kader – kadernya untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan memegang jabatan dengan amanah.

Hal itu juga yang membuat tidak dapat di dogkraknya perolehan suara pada pemilihan umum.

Dalam pembahasan ini, cukup membuktikan bahwa pentingnya kaderisasi yang matang dalam partai politik, sehingga terbangunnya loyalitas yang tinggi terhadap partainya. Karena kader dalam hal ini ia sebagai tulang punggung penggerak roda partai. Selanjutnya kaderisasi dalam partai politik yang dimaksud, ia mampu menghasilkan kualitas – kualitas kader yang memiliki kemampuan membawa nilai – nilai perjuangan yang berkesinambungan yang mengembangkan komitmen yang jelas dan terarah terhadap personal partai politik mengenai visi, misi perjuangan parpol yang pada akhirnya menciptakan ikatan emosional yang *integrated* serta memiliki rasa nasionalisme dengan mengedepankan nilai – nilai kepentingan nasional.

Kaderisasi dipengaruhi oleh tradisi partai dan lingkungan politik, tidak semua partai politik menjadikan keanggotaan sebagai satu – satunya jalan masuk menuju jenjang karir politik yang terhormat. Bahwa setiap partai politik terdapat prosedur – prosedur untuk melaksanakan Rekrutmen atau penyelesaian yang berbeda – beda satu dengan yang lainnya. Dimana kaderisasi adalah suatu proses membentuk dan mempersiapkan tenaga – tenaga potensial, militan, terdidik, terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan tugas – tugas pencapaian misi organisasi secara optimal

dimanapun berada dengan penuh dedikasi, semangat, dan tanggap terhadap situasi yang ada.

Dalam konteks pengkaderan, partai Demokrat mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk mendapatkan kader yang tangguh maka harus melalui program pelatihan kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader – kader partai demokrat. Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi disemua tingkatan telah mewujudkan kader demokrat yang berkualitas, beriman, tidak cemar, bermoral baik, dan memiliki militansi tinggi. Partai Demokrat berperan pula dalam tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Partai Demokrat, kaderisasi menjadi aktivitas utama partai, untuk itu partai Demokrat tidak begitu menekan kepada jumlah massa yang besar tetapi lebih menekankan pada disiplin anggota- anggotanya dan ketaatan dalam organisasi sehingga kekuatan partai kader sesungguhnya bersumber bukan dari kuantitas melainkan kualitas anggotanya.

Kemudian dipilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sub penelitiannya. Selain kota ini dikenal dengan kota budaya, kota pendidikan, kota wisata, dll. Kota ini juga menjadi basis baru Partai Demokrat. Dalam perolehan suara berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU DIY, untuk DPR RI, PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 570.531 suara atau 19,22 persen. Disusul Partai Amanat Nasional sebanyak 355.787 suara atau 17,28

persen, Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 244.144 suara atau 11,85 persen, Partai Golongan Karya sebanyak 200.474 suara atau 9,73 persen, Partai Keadilan Sejahtera 147.875 suara atau 7,18 persen. Selanjutnya, pada peringkat keenam ditempati oleh Partai Demokrat yang memperoleh 146.688 suara atau 7,12 persen.²

Hasil perolehan suara kecil di DIY tidak lepas dari kontroversi yang terjadi pada tahun 2012, pada saat itu sebanyak 250 kader Partai Demokrat yang terdiri dari PAC Mantrijeron, dan Kraton menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai, serta mereka mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) kepada pimpinan DPD Partai Demokrat saat itu.³ Menurut Bapak GBPH. Prabukusumo selaku mantan ketua DPD partai Demokrat DIY :

.....“Saya Ketua DPD PD DIY itu mundur karena kecewa dengan sikap elite partai dan pemerintah yang menolak mekanisme penetapan Gubernur/Wagub dalam RUUK DIY. Meski pada akhirnya, Partai Demokrat menjilat lidah, dan sepakat dengan mekanisme penetapan Gubernur/Wagub DIY”⁴

Dari pembahasan di atas menunjukkan kesetiaan kader kepada partai belum tertanam secara mendalam dihati para kader demokrat.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah: bagaimana pola kaderisasi dari suatu partai politik dan

bersambung dengan itu proses dari suatu pengkaderan dari partai politik dalam kasus ini adalah partai Demokrat di Dewan Pimpinan Daerah Daerah Istimewa. Hal tersebut di atas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: ” Analisis Pola Rekrutmen Dan Sistem Pengkaderan Partai Demokrat “ Studi kasus DPD Partai Demokrat DIY Periode 2016 – 2018”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dijabarkan dari latar belakang masalah diatas maka, penulisan dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat D.I.Yogyakarta Periode 2016 – 2018 ?
2. Bagaimana Sistem Pengkaderan yang dilakukan oleh Partai Demokrat D.I.Yogyakarta Periode 2016 – 2018 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pola Rekrutmen yang dilakukan oleh partai Demokrat D.I.Yogyakarta Periode 2016 – 2018
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem Pengkaderan yang dilakukan oleh partai Demokrat D.I.Yogyakarta Periode 2016 – 2018.

D. MANFAAT PENELITIAN

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi ilmu pemerintahan khususnya yang terkait dengan Rekrutmen Partai Politik.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Partai Demokrat atau partai lain, dalam melakukan pengkaderan yang baik dan sesuai dengan cita – cita luhur partai. Agar kader yang telah diberikan pelatihan menjadi kader yang memiliki integrasi tinggi serta terwujudnya kader yang profesional, berkualitas dan bermoral baik.

E. KERANGKA TEORI

1. Partai politik

a. Pengertian partai politik

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum partai politik merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam sistem tersebut. Partai politik merupakan satu pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan platform politik. Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut :

1) Roger F. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

2) Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan ideil bagi anggotanya⁵

3) Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

4) Mac Iver

Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD.

5) Stephen Tarsey

Partai politik adalah kelompok sosial yang berusaha menguasai sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah Negara dan biasanya cara – cara yang diambil lewat pemilu.

b. Fungsi partai politik

Menurut Meriam Budiharjo, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

1) Sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

2) Sarana Sosialisasi Politik

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan (Asshiddiqie, 2006) ide, visi dan kebijakan strategis

partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.

3) Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, Rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

4) Sarana Mengelola Konflik

Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

c. Tugas Partai Politik

1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyetorkan kepada

pemerintahan untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.

- 2) Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide – ide yang tersimpulakn didalam renca kebijaksanaan pemerintah.
- 3) Partai politik bertugas juga untuk menambahkan dan memupuk kesadaran akan rasa nasionalisme.
- 4) Partai politik bertugas mencari dan mengajak serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat, mampu ikut serta dalam relative dalam lapangan kegiatan politik serta mendidik mereka untuk menjadi kader pimpinan.
- 5) Partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik – konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari peyelesaiannya.

d. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menurut Maurice Duverge dalam bukunya *Political Parties* demikian juga G.A. Jacobson dan M.H. Lipman dalam bukunya berjudul *Political Science* mengklasifikasikan sistem kepartaian dalam tig macam sistem, yakni :

1) Sistem Partai Tunggal

Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang dominan. Sebagian pengamat berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal Universitas Sumatera Utara merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian.

Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut oleh negara – Negara yang baru saja merdeka, oleh karena sebagai sebuah negara baru, negara tersebut belum mampu untuk menciptakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa partai politik. beberapa negara-negara yang menganut sistem kepartaian seperti ini yaitu Afrika, China, Kuba, dan Uni Soviet pada masa jayanya.

Pola sistem kepartaian ini disebutkan adalah suatu sistem kepartaian yang tidak kompetitif oleh karena dalam sistem ini setiap golongan maupun setiap orang mau ataupun tidak mau harus menerima setiap pimpinan partai politik sehingga apabila tidak dapat menerima pimpinan partai politik tersebut dianggap sebagai suatu tindakan penghianatan.

Negara yang paling berhasil menganut sistem ini adalah Uni Soviet pada masa kejayaannya. Partai Komunis Uni Soviet berhasil menyingkirkan partai-partai politik lain dan bekerja secara tidak

kompetitif. Di negara Uni Soviet ini tidak diperkenankan adanya partai politik lain untuk tumbuh dan berkembang selain dari pada Partai Komunis Uni Soviet dan setiap munculnya oposisi maka akan dianggap sebagai suatu penghianatan. Partai tunggal dan organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

2) Sistem Dua Partai

Sistem Dua Partai dapat diartikan yakni ada dua kekuatan partai politik yang dominan di dalam suatu negara. Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam suatu pemilihan umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian mempunyai suatu kedudukan yang dominan.

Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni partai berkuasa dan partai oposisi. pembagian partai ini didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang menang akan menjadi partai penguasa dan partai yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap

kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Sistem dua partai sendiri dikatakan sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara oleh karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan sehingga dengan demikian jelas terbagi mana partai ya pro terhadap pemerintahan dan yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun, terdapat kritik dari sarjana Ilmu Politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa dalam masyarakat sistem dua partai apabila terjadi perbedaan pandangan maka akan yang akan terjadi adalah mempertajam perbedaan oleh karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat merdekannya.

Negara-negara yang menganut sistem dua partai umumnya merupakan Negara- negara anglo saxon seperti Inggris dan Amerika. Inggris merupakan salah satu negara yang disebut ideal dalam melaksanakan sistem dua partai. Sistem dua partai ini dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu, komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsesus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemilihan yang bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian muncul hanyalah partaipartai dominan.

3) Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara ada terdapat banyak partai politik. Miriam Budiarmo, mengemukakan bahwa keanekaragaman budaya politik yang ada di dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem multi partai.

Apabila didalam suatu negara terdapat beragam suku, agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian kelompok-kelompok yang plural ini mendorong pilihan kepada sistem Multi partai oleh karena adanya pluralitas budaya dan pluralitas politik tersebut. Negara-negara yang menganut sistem multi partai ini diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Belanda.

Sistem Multi partai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan maka sistem pemerintahan yang cocok dengan sistem

multi partai ini adalah sistem pemerintahan parlementer karena sistem pemerintahan ini memusatkan kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini yang kemudian dapat memunculkan koalisi antar partai politik karena, hasil dari pemilihan umum dengan sistem multi partai ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang akan menjadi partai politik yang dominan sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di parlemen.

Sistem multi partai ini juga dinilai tidak cocok di terapkan di nagara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini karena stabilitas yang dikehendaki dalam sistem presidensial hanya dapat terwujud jika tidak terlalu banyak partai yang merebutkan kekuasaan.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemilihan maka sistem multi partai ini diperkuat dengan sistem pemilihan perwakilan berimbang yang mana dengan sistem pemilihan ini maka partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.

e. Kategori partai politik berdasarkan fungsi

Sebelum membahas tentang aktualisasi partai politik maka dipandang perlu untuk menjelaskan secara lebih jauh tentang jenis – jenis partai politik yang ada di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas fungsi yang telah dijalankannya. Diharapkan nantinya dengan melihat jenis – jenis partai politik ini kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kinerja yang nantinya akan ditampilkan oleh masing – masing partai politik yang ada di Indonesia.

1) Partai Proto

Adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah perbedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Terlebih partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.

2) Partai Kader

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat;

3) Partai Massa

Muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.

4) Partai Diktatorial

Sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa.

5) Partai Catch-all

Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-

kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya". Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

Table 1.2
Karakteristik Model Partai Politik

| No | Dimensi/ Karakteristik | Partai Elit/Kader | Partai Massa | Partai Catch-All | Partai Kartel |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Dimensi Elektoral | | | | | |
| 1 | Basis Massa atau Pendukung | Massa atau pendukung terbatas pada strata atas, melalui kontak personal | Muncul dari kelompok sosial khusus, seperti agama, etnis atau kelas | Muncul dari kelas menengah, melampaui kelompok pendukung inti | “ <i>Regular clientele</i> ” yang menyediakan pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntungkan |
| 2 | Tipe Rekrutmen Elit | <i>Self-recruitment</i> , Rekrutmen terbatas pada kelas atas, elit agama atau tokoh etnis | Rekrutmen internal berdasarkan agama, etnis, atau kelas atau dengan komitmen berbasis ideologi | Rekrutmen eksternal dari beraneka ragam kelompok kepentingan | Rekrutmen Terutama berasal dari dalam struktur negara (pejabat publik) |
| Dimensi Idiologi | | | | | |
| 3 | Basis atau Landasan Kompetisi Partai | Status tradisional dari kandidat atau individu itu sendiri | Ideologi dan/atau representasi dari kelompok sosial | Pragmatis me: Disesuaikan dengan mood mayoritas pemilih | Memelihara kekuasaan yang tumbuh dari pembagian jabatan eksekutif |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 4 | Perluasan atau Arah Kompetisi Partai | Sangat terbatas pada basis status personal atau individu dan kekayaan | Terpolarisasi dan kompetisi yang bersifat ideologi (kompetisi sentrifugal) | Basis kompetisi bersifat sentripetal | Penyebaran ketidaksesuaian politik, konflik menjadi simbolik; kompetisi artifisial dalam isu |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|

Sumber: Diadaptasi dari Krouwel, Party Models dalam Katz dan Crotty ed. Handbook of Party Politics, hal. 262.

2. Sistem Kepartaian

Setelah presiden Suharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat tiga perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu. Pertama, kembalinya “sistem muti partai” dari “sistem tri partai” dalam pemilu yang terrealisasikan pada tanggal 7 juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. kedua, pada pemilu 2004, pemilu diadakan dua kali; pemilu pertama untuk memilih wakil – wakil rakyat dan pemilu kedua untuk memilih presiden secara langsung. Perubahan yang ketiga, dengan dikeluarkan PP no IV tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PILKADA (pemilihan kepala daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004.

3. Rekrutmen Politik

Sebagai sarana Rekrutmen politik yakni proses melalui partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas para calon pemimpin partai dan pimpinan bangsa. Yang kemudian dapat kita lihat dan rasakan dampaknya ketika kader partai tersebut menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.

a. Kaderisasi

Kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan “penggembengan” atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara insentif dibidang – bidang tertentu terhadap kader –kadernya. Hal ini dapat dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada tingkatan kepengurusan partai.

b. Sistem pengkaderan

Sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman – pedoman pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini secara umum mengharapkan hasil yang cukup maksimal sehingga partai politik memiliki generasi penerus.

1) Bentuk dan jenjang pengkaderan

Pengkaderan didefinisikan oleh Vancevich (1995) adalah sebagai “usaha meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Beliau mengemukakan sejumlah butir penting tentang Pengkaderan yang dapat kita lihat dibawah ini :

a) Pengkaderan

Adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur organisasi. Pengkaderan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerja yang sekarang dilakukan. Pengkaderan berorientasi ke masa sekarang dan membantu kader politik untuk menguasai keterampilan dan kemampuan yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

b) Program pengkaderan formal

Adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memberi kesepahaman kepada kader agar menguasai keterampilan dan ilmu pengetahuan.

c) Belajar (*Learning*)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kader dalam usaha menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap

tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relative permanen dalam perilaku kinerja mereka.

d) Keterampilan (*Skill*)

Adalah setiap perilaku kerja yang telah dipelajari. Oleh karena itu, yang harus dicapai dalam pengkaderan adalah peningkaytan keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang biasanya menjadi prioritas utama pengkaderan adalah keterampilan yang bersifat motorik (menggunakan organ tubuh terutama tangan), kognitif (kemampuan yang mengutamakan daya nalar atau analisis), dan verbal (menggunakan mulut atau berkomunikasi) yang juga disebut keterampilan “interpersonal”.⁶

2) Prinsip dasar bagi pengkaderan

Dasar didalam Pengkaderan merupakan hal yang perlu diperhatikan didalam melakukan suatu proses Pengkaderan. Berdasarkan pengalaman dan penelitian para ahli ada sembilan prinsip dalam Pengkaderan sebagai berikut:

a) *Individual Differences*

Tiap – tiap individu mempunyai ciri khas berbeda satu dengan yang lain, baik mengenai sifat, tingkah laku, bentuk keadaannya maupun pekerjaannya.

b) *Relation to job analysis*

Analisis jabatan mempunyai tugas utama untuk memberikan pengertian akan tugas yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan.

c) *Motivation*

Adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan dorongan untuk melaksanakan suatu tugas.

d) *Active participant*

Didalam melaksanakan Pengkaderan (training) para peserta dapat dilibatkan langsung dalam mengambil peran dalam membicarakan mengenai apa dan bagaimana melakukan suatu pekerjaan.

e) *Selection of Trainees*

Training sebaiknya diberikan kepada mereka yang mempunyai minat dan menunjukkan bakat untuk mengikuti Pengkaderan tersebut dengan baik.

f) Selection Trainer

Dalam Training yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya manusia yang mengelola suatu Pengkaderan.

g) Principles of learning

Dalam pelatihan azas/dasar dari ilmu pengetahuan juga harus dijaga dan diperhatikan⁷

3) Metode Pengkaderan

Menurut Drs. Moekijat bahwa metode Pengkaderan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak satupun metode yang paling baik bila dibandingkan dengan metode yang lain.⁸

Oleh karena itu metode – metode yang digunakan dalam suatu Pengkaderan disesuaikan dengan jenis pengkaderan yang akan diberikan kepada perorangnya atau kelompok.

Menurut Manullang metode Pengkaderan dapat dibagi menjadi tiga model yakni :

a) Metode kuliah

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari Pengkaderan kepada peserta Pengkaderan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini dapat sangat efektif maupun dapat membosankan peserta, hal ini tergantung dari sumber daya yang menjadi trainer.

b) *Case Method* dan *Incident Method*

Case Method adalah suatu metode dimana para peserta diberi suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisis. Kasus yang digunakan untuk merangsang topic – topic diskusi dan dari semua jenis seperti simulasi, kasus sederhana, ataupun kompleks.

Incident method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus dalam bentuk paoran tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah ditentukan untuk memberikan informasi kemudian peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan.

Perbedaan *case method* dan *incident method* adalah dalam *case method* peserta diberikan 80% sedangkan dalam *incident method* peserta hanya diberikan gambaran masalah sebesar 25% saja. Selebihnya dicari sendiri oleh peserta.

c) *Simulation method*

adalah metode dimana para peserta pelatihan lebih memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan oleh peserta yang lain. Adapun jenis simulasi terdiri dari tiga model yakni :

a. *Management Game*

Yakni peserta diminta memainkan peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan, dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian disediakan keterangan – keterangan dan grup – grup tersebut harus mengambil keputusan sebelum permainan selesai, lalu di presentasikan kepada masing – masing grup.

b. *Role Playing*

Suatu model situasi yang digunakan dalam *human relation training* gunanya adalah untuk pengembangan keahlian *humas relation*.

c. Evaluasi pertrainingan

Evaluasi pertrainingan merupakan tahapan didalam suatu Pengkaderan yang menfokuskan pada pematangan hasil – hasil dari suatu pengkaderan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

F. DEFENISI KONSEPSIONAL

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam melakukan penerapan teori pada skripsi ini. Adapun defenisi konsepsional yang digunakan didalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh warga Negara sukarela yang memiliki tujuan, cita – cita dan orientasi untuk merebutkan dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.

2. Rekrutmen politik merupakan proses seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
3. Kaderisasi adalah kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan “penggembleran” atau pematangan terhadap SDM-nya (Kader).
4. Sistem pengkaderan adalah suatu pola yang teratur dan terencana serta kontinu dalam pengkaderan.

G. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi Operasional adalah arincian indikator yang berguna sebagai paduan dalam mengumpulkan data lapangan. Dalam penelitian tentang sistem pengkaderan partai demokrat, indikatornya adalah :

1. Kaderisasi Partai Politik dengan Indikator :

- 1) Tata cara penjaringan kader
- 2) Tata cara bagaimana mengikuti pengkaderan
- 3) Bentuk – bentuk dari proses kegiatan pengkaderan
- 4) Hasil dan manfaat dari proses pengkaderan

2. Sistem pengkaderan disini meliputi :

- 1) Bentuk pengkaderan yang terdiri dari :
 - 1) Pengkaderan Formal

Merupakan pengkaderan bersifat terstruktur dan berjenjang dan memiliki pedoman / petunjuk pelaksanaan Pengkaderan.

2) Pengkaderan Non Formal

Merupakan Pengkaderan yang bersifat pembinaan dan pengembangan keterampilan, keahlian, dan atau profesi anggota kader partai.

3) Pengkaderan Informal

Merupakan Pengkaderan informal bersifat sebagai tempat pengimplementasian dari hasil yang telah diperoleh setiap kader dari Pengkaderan Formal Dan Non Formal seperti kepanitiaan.

2) Jenjang dan Tujuan Pengkaderan yang meliputi :

1) Jenjang Pengkaderan

Merupakan sebuah usaha meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

2) Tujuan Pengkaderan

Membentuk suatu sistem kerja individu/kader yang terstruktur dan bisa diukur tingkat

keberhasilan yang telah dicapai dalam proses Pengkaderan.

3. Materi Pokok Pengkaderan

- 1) Materi Ideologi, Kenegaraan dan Kebangsaan
- 2) Materi Ke-Demokratan
- 3) Materi Keorganisasian, Kepemimpinan, Keahlian
- 4) Materi Masalah Organisasi dan Muatan Lokal

4. Metode Pengkaderan Meliputi :

- 1) Ceramah

Metode yang digunakan dalam Pengkaderan sebagai sarana penyajian informasi yang bersifat satu arah (monolog).

- 2) Diskusi

Metode Pengkaderan yang memfokuskan para peserta Pengkaderan untuk melakukan pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pendapat secara bebas.

- 3) Mentaplan

Metode dalam Pengkaderan yang lebih banyak menggunakan media/alat peraga untuk melihat sejauh mana kapasitas pengetahuan peserta.

- 4) Studi Kasus

Merupakan metode dalam Pengkaderan yang menekankan pada pengkajian suatu masalah oleh para peserta sehingga muncul suatu solusi awal dari masalah yang telah disuguhkan.

5. Evaluasi dan *Followup* Pelatihan

1) Evaluasi

Merupakan pengamatan Pengkaderan dan penilaian yang dilakukan secara sadar dan terencana terhadap proses pelatihan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

2) *Follow Up* (Rencana Tindak Lanjut)

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses pelaksanaan Pengkaderan akan berakhir, guna merencanakan kegiatan tindak lanjut kepada peserta pasca pelatihan.

Table 1.3
Definisi Konseptual dan Operasional

| No | Def. Konseptual | Def. Operasional | Instrumen | Wawancara |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Rekrutmen Partai Politik | Tata Cara Penjaringan Kader | Bagaimana Penjaringan | W1 |
| | | | Metode Penjaringan | W2 |
| | | | Media Penjaringan | W3 |
| | | Tata Cara Bagaimana Mengikuti Pengkaderan | Alur Mengikuti Pengkaderan | W4 |
| | | | Syarat Mengikuti Pengkaderan | W5 |
| | | Bentuk dan Proses kegiatan Pengkaderan | Bentuk kegiatan rekrutmen | W6 |
| | | | Proses pelaksanaan pengkaderan | W7 |
| | | Hasil dan manfaat dari proses pengkaderan | Hasil dari proses rekrutmen | W8 |
| | | | Manfaat dari rekrutmen | W9 |
| | | 2 | Sistem Pengkaderan | Bentuk Pengkaderan |
| Pengkaderan Non Formal | W11 | | | |
| Pengkaderan In Formal | W12 | | | |
| Jenjang dan Tujuan Pengkaderan | Jenjang Pengkaderan | | | W13 |
| | Tujuan Pengkaderan | | | W14 |
| Materi Pokok Pengkaderan | Materi Ideologi, Kenegaraan dan Kebangsaan | | | W15 |
| | Materi Ke-Demokratan | | | W16 |
| | Materi Keorganisasian | | | W17 |
| | Materi Masalah Organisasi | | | W18 |
| Metode Perkaderan | Ceramah | | | W19 |
| | Diskusi | | | W20 |
| | Mentaplan | | | W21 |
| | Studi Kasus | | | W22 |
| Evaluasi dan <i>Followup</i> | Bagaimana Evaluasi | | | W23 |
| | Bagaimana Tindak Lanjut | W24 | | |

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007: 5). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena mengenai hal-hal serta kejadian yang dialami subyek penelitian misalnya sikap, persepsi, tindakan, motivasi secara holistik kemudian diinterpretasikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk susunan kalimat pada konteks yang alamiah menggunakan metode ilmiah.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Suyanto (dalam Alhafiz, 2016: 24) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan.

Jadi, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu objek, kondisi, sikap, pandangan dimana data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto. Kemudian data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh peneliti yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek yang sangat vital, oleh karena itu dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa. Hal ini ditulis karena peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dalam melakukan Pengkaderan kepada kadernya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisa

Adapun unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Unit Analisa Penelitian

| No | Instansi | Jumlah Responden |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Kepala DPD Partai Demokrat DIY | 1 |
| 2 | Ketua BPOKK | 1 |
| 3 | Dirktur Eksekutif | 1 |
| 4 | Ketua Kader Muda Demokrat | 1 |
| 5 | Ketua Organisasi Sayap Parta | 1 |
| Jumlah | | 5 |

4. Jenis Data

Ada dua jenis data yang akan saya gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu data primer dan data skunder.

a. *Data Primer*

Semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang di peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada responden yang telah ditetapkan.

Tabel 1.5
Data Primer

| No | Data Primer | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|----|--|--|-------------------------|
| 1 | Strategi DPD Partai Demokrat dalam melakukan Rekrutmen dan pengkaderan terhadap kader. | 1. Ketua DPD Partai Demokrat DIY 2. Bagian Pengembangan Kader | Wawancara |
| 2 | Pola Rekrutmen Kader di DPD Partai Demokrat | Bagian Pengembangan Kader | Wawancara |
| 3 | Bentuk Pengkaderan yang dilakukan di DPD partai demokrat DIY | Bagian Pengembangan Kader | Wawancara |

b. Data Sekunder

Semua informasi yang kita peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen- dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Dewan pimpinan Daerah Partai Demokrat D.I.Yogyakarta yang didapat melalui internet maupun secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal, dan arsip- arsip yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Tabel 1.6
Data Sekunder

| No | Data Sekunder | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Jumlah Kader Partai Demokrat DIY | DPD Partai Demokrat | Dokumentasi |
| 2 | Pedoman Pengkaderan Partai Demokrat | DPD Partai Demokrat | Dokumentasi |
| 3 | Laporan Monev Pengkaderan | DPD Partai Demokrat | Dokumentasi |
| 4 | Materi Pengkaderan | DPD Partai Demokrat | Dokumentasi |
| 5 | Alur Recrutimen Partai Demokrat | DPD Partai Demokrat | Dokumentasi |

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian. Menurut Natsir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data mengenai keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Observasi mempunyai dua macam diantaranya:

- Observasi partisipations adalah observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan keterlibatan peneliti di dalam situasi yang melingkupi unit analisa penelitian.
- Observasi non-partisipations adalah observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan tanpa keterlibatan penelitian di dalam situasi yang melingkupi unit analisa penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Teknik Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui kontak langsung antara pengumpulan data dengan sumber data yang dikenal dengan sebuah responden. Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai secara langsung para responden yang mempunyai kewenangan sehubungan dengan pengkaderan didalam partai demokrat. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Kepala Bagian bersangkutan
- 3) Kepala Bagian bersangkutan

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk memperoleh data-data skunder yang dibutuhkan untuk mendukung

data primer. Data dokumen dibatasi oleh ruang dan waktu yang telah tersedia dan dikumpulkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk memperoleh data dokumentasi dari Derwan Pimpinan Daerah Partai Demokrat D.I.Yogyakarta melalui internet atau secara langsung, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, arsip dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu menganalisis masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis dengan menggunakan analisis ini agar mendapatkan jawaban yang ilmiah, logis dan empiris.

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik primer karena data yang dibutuhkan didapat langsung melalui wawancara yang menanyakan langsung kepada responden yang menyangkut tentang: Analisa Pola Rekrutmen dan Sistem Pengkaderan Partai Demokrat “Studi di DPD Partai Demokrat D.I.Yogyakarta periode 2016 – 2018”.

Di dalam penelitian ini ada 4 proses analisa data kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode

yang telah ditentukan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang sudah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid.